

DAMPAK KEBIJAKAN MIGRASI TERHADAP DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA (*Impact of Migration Policy on Income Distribution in Indonesia*)

Yuni Sulistyorini, Rina Oktaviani, M. Parulian Hutagaol
Fakultas Ekonomi Institut Pertanian Bogor

Abstracts

The Remittances of international migrants directly contribute in various ways to the welfare of their own household and indirectly contribute to the economy as foreign exchange earnings for the country. Studies of the impact of migrant's remittances on the distribution income in the receiving country report apparently conflicting result, some have found that remittance inflows increase the inequality of income and some have found that they decrease it. Therefore this study examines impact of remittance on income distribution in Indonesia. Analysis of Social Accounting Matrix (SAM) is used to determine impact of remittances on income distribution in Indonesia. Furthermore, analysis of income inequality using the Theil index is used to analyze the role of remittance receipts on income inequality. Grouping households in the SAM based on agricultural and non-agricultural sectors was conducted to determine which groups of households are most affected when there is a change receiving remittances from family members working abroad. The result obtained conclude that remittances contribute to increasing household incomes particularly the agricultural labor household. Furthermore, receipt of remittances from migrants decreased the inequality of income in Indonesia.

Keywords: *remittance, income distribution, inequality, SAM.*

JEL Clasification : *F24*

PENDAHULUAN

Tingkat pengangguran yang tinggi, kurangnya kesempatan kerja yang layak (*decent work*) dan produktif bagi pekerja merupakan masalah yang umumnya terjadi di negara berkembang termasuk Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 menunjukkan 31,54% penduduk yang bekerja merupakan kelompok pekerja rentan (*vulnerable employment*). Pekerja rentan yaitu pekerja setengah pengangguran yang ditandai dengan jumlah jam kerja kurang dari jam kerja normal. Jumlah pekerja rentan menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2009 sebesar 30,1% meningkat menjadi 31,54% pada tahun 2011. Hal ini disebabkan iklim ketenagakerjaan di Indonesia belum dapat mendorong penciptaan kesempatan kerja yang memadai, sehingga keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan tenaga kerja di dalam negeri belum tercapai.

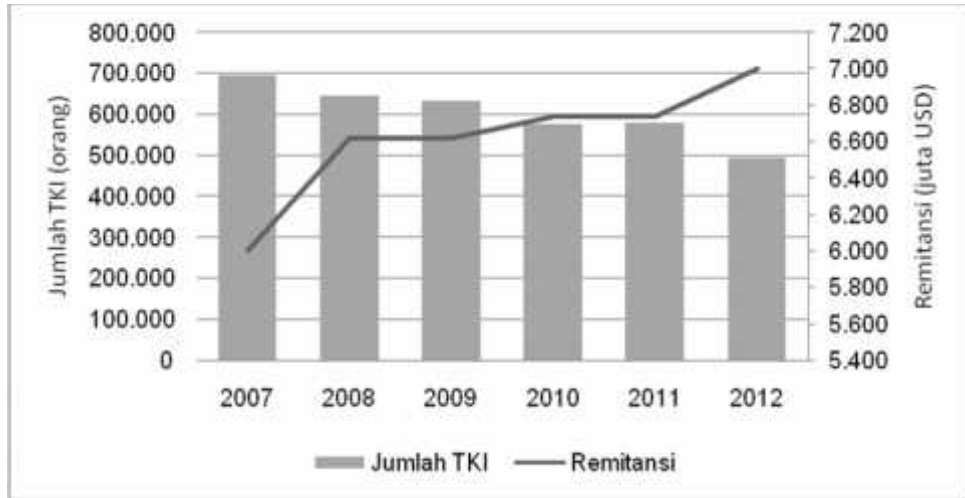
Adanya kesenjangan antara kesempatan kerja dengan angkatan kerja yang tersedia membuat kelompok tenaga kerja rentan yang umumnya

memiliki ketrampilan (*skill*) yang rendah akan berusaha untuk meningkatkan taraf hidupnya dan memperoleh kesejahteraan ekonomi yang lebih baik dengan mencari kesempatan kerja di luar negeri dan mengirimkan uang (remitansi) kepada keluarga yang ditinggalkan.

Remitansi memainkan peran penting dalam pembangunan khususnya di negara-negara sedang berkembang. Jumlah arus masuk remitansi ke negara berkembang pada tahun 2012 diperkirakan mencapai \$406 juta, meningkat 6,5% dari \$381 juta pada tahun 2011. Jumlah sebenarnya dari arus remitansi diperkirakan lebih besar dari jumlah yang tercatat saat ini, mengingat adanya aliran pengiriman uang lewat jalur informal yang jumlahnya cukup besar. Remitansi juga merupakan sumber yang penting dalam dukungan keuangan yang secara langsung meningkatkan pendapatan rumahtangga pekerja migran. Remitansi mendukung investasi rumahtangga dalam kesehatan, pendidikan dan usaha kecil rumahtangga. Jadi migrasi internasional melalui remitansi akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan keluarga migran dan pembangunan di negara asal (World Bank, 2012). Migrasi telah menjadi strategi mata pencaharian penting bagi masyarakat Indonesia untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri (TKI) melakukan migrasi untuk beberapa alasan termasuk kurangnya peluang kerja, kemiskinan dan perbedaan gaji antara Indonesia dengan negara tujuan.

Karakteristik tenaga kerja Indonesia tahun 2010 - 2012 masih didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) kebawah, pada tahun 2010 sebesar 55,31 juta orang (51,49%) dan pada tahun 2012 sebesar 55,51 juta orang (49,21%). Sedangkan lapangan kerja yang tersedia bagi pekerja yang memiliki tingkat pendidikan SD kebawah pada umumnya adalah sektor pertanian dan jasa kemasyarakatan (BPS, 2012). Sebagian besar penduduk miskin terutama di daerah pedesaan merupakan buruh tani tanpa atau dengan kepemilikan lahan dan akses terhadap modal yang sangat terbatas. Tingkat upah yang rendah serta akses terhadap modal yang terbatas akan meningkatkan kesenjangan pendapatan (Harahap, 2012).

Selama periode 2007-2012 angka gini rasio di Indonesia mengalami peningkatan. Angka gini rasio menunjukkan adanya perubahan distribusi pendapatan penduduk. Gini rasio juga digunakan untuk melihat apakah pemerataan pendapatan penduduk semakin baik atau semakin buruk. Pada tahun 2007 angka gini rasio 0,38 meningkat menjadi 0,41 pada tahun 2012. Peningkatan angka gini rasio mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan pada periode tersebut semakin memburuk (BPS, 2012).



Gambar 1. Perkembangan penempatan TKI dan penerimaan remitansi Indonesia 2007 – 2012

Sumber : BNP2TKI, 2012

Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memperlihatkan bahwa migrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dan penerimaan remitansi memiliki kecenderungan yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2007 jumlah penempatan TKI ke luar negeri sebesar 696 ribu orang dimana sebagian besar bekerja di sektor informal sebesar 72% dan remitansi yang dihasilkan mencapai 6.003 juta USD. Pada tahun 2012 jumlah penempatan TKI sebesar 495 ribu orang dimana komposisi pekerja sektor informal menurun menjadi 48% dan remitansi yang dihasilkan meningkat menjadi 6.998 juta USD. Penurunan jumlah tenaga kerja di sektor informal merupakan dampak dari kebijakan pembatasan (moratorium) penempatan TKI ke beberapa negara Timur Tengah dan Malaysia. Kebijakan tersebut dilakukan untuk melindungi TKI karena jaminan keamanan dan kelayakan pekerjaan di sektor informal sangat rendah. Dampak dari kebijakan moratorium tidak menurunkan jumlah penerimaan remitansi karena jumlah penempatan TKI di sektor formal mengalami peningkatan dan upah/gaji yang diperoleh dari sektor formal lebih tinggi dibandingkan dengan gaji/upah sektor informal.

Remitansi memiliki peran penting tidak hanya bagi rumah tangga keluarga pekerja migran saja tetapi juga mendatangkan manfaat bagi negara yaitu sebagai devisa negara dan perekonomian negara secara keseluruhan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan remitansi. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan biaya administrasi pengiriman uang dan kemudahan pembuatan rekening bagi tenaga kerja migran.

Kebijakan penempatan TKI di sektor formal secara empiris terbukti mampu untuk meningkatkan penerimaan remitansi, meskipun jumlah TKI secara total mengalami penurunan. Oleh karena itu pemerintah melalui BNP2TKI menetapkan target penempatan TKI sebesar 600 ribu orang pada tahun 2013 atau meningkat 21% dibandingkan dengan tahun 2012 dengan tetap memberlakukan kebijakan moratorium dan lebih mengutamakan penempatan TKI di sektor formal. Pemerintah juga menetapkan target jangka panjang untuk menghentikan penempatan TKI sektor informal pada tahun 2017 dan hanya melakukan penempatan TKI di sektor formal saja.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan penempatan TKI terhadap distribusi pendapatan di Indonesia, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang paling efektif berpengaruh terhadap distribusi pendapatan di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan Teori

Keputusan seseorang untuk melakukan migrasi didorong oleh faktor ekonomi dan sosial. Faktor ekonomi yang menjadi faktor pendorong adalah perbedaan tingkat upah, terbatasnya kesempatan kerja dan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah. Tingginya tingkat upah dan kesempatan kerja yang tersedia di daerah tujuan migrasi memunculkan harapan akan memperoleh peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan tingkat upah yang lebih tinggi untuk memperbaiki taraf hidup pekerja migran. Sedangkan faktor sosial yang mendorong dilakukannya migrasi adalah masalah lingkungan, demografi maupun desakan sosio-politik (Todaro & Smith, 2006).

Pada dasarnya teori migrasi Todaro beranggapan bahwa setiap pekerja selalu membandingkan penghasilan yang diharapkan (*expected wage*) selama kurun waktu tertentu di sektor modern (*urban*) yaitu selisih antara penghasilan dan biaya migrasi dengan rata-rata penghasilan yang bisa diperoleh di sektor tradisional (*rural*). Hal ini menyebabkan terjadinya arus migrasi dari desa ke kota. Namun terbatasnya kesempatan kerja di sektor modern (*urban*) mengakibatkan tenaga kerja yang tidak terserap akan menganggur atau memasuki sektor informal yang berpendapatan rendah. Migrasi internal yaitu migrasi yang dilakukan dari desa ke kota menyebabkan tingkat pengangguran yang semakin tinggi di daerah perkotaan, maka migrasi internasional merupakan salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut. Migrasi internasional selain untuk mengatasi masalah pengangguran juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, karena umumnya migrasi terjadi karena didorong oleh tingkat upah yang lebih tinggi di negara lain.

Migrasi internasional dapat juga meningkatkan devisa negara melalui pengiriman uang (remitansi). Remitansi tersebut digunakan oleh

rumahtangga penerima untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (*basic need*) atau investasi. Jika penghitungan pendapatan nasional ditinjau dari sisi pengeluaran, maka peningkatan konsumsi masyarakat dapat meningkatkan pendapatan nasional. Demikian juga jika remitansi tersebut digunakan untuk investasi (menabung) dan diasumsikan bahwa masyarakat melakukan investasi di dalam negeri pada lembaga-lembaga keuangan, maka tabungan masyarakat dapat digunakan untuk membiayai sektor riil. Selanjutnya peningkatan investasi secara langsung dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja dan pada akhirnya juga meningkatkan pendapatan nasional.

Model *wage narrowing and efficiency gains* menyatakan bahwa migrasi internasional juga dapat mendorong terjadinya efisiensi. Perbedaan upah yang terjadi antara dua negara akan menyebabkan terjadinya migrasi. Selama pekerja atau perusahaan bebas keluar dan masuk pasar tenaga kerja, maka ekonomi yang kompetitif akan ditandai dengan upah tunggal. Upah tunggal dalam keseimbangan kompetitif memiliki implikasi penting untuk efisiensi ekonomi (Borjas, 2005).

Kesenjangan pendapatan dapat dikategorikan sebagai distribusi pendapatan yang tidak merata antar rumahtangga. Rumahtangga dipilih sebagai unit observasi untuk kesenjangan karena unit kehidupan individu adalah rumahtangga. Kesenjangan pendapatan antar rumahtangga pada umumnya diukur dengan distribusi pendapatan berdasarkan tingkat pendapatan rumahtangga. Faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan pendapatan diantaranya adalah perubahan dalam *factor shares*, dualitas struktur ekonomi, perbedaan pendapatan antara sektor pertanian dan non pertanian dan redistribusi pendapatan dan aset (Hayami, 2001).

Tinjauan empiris

Osaki (2003) melakukan penelitian tentang kontribusi remitansi terhadap kesejahteraan rumahtangga di negara asal yaitu Thailand. Data yang digunakan adalah data dari hasil survei migrasi nasional pada tahun 1992. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku remitansi di Thailand berhubungan dengan faktor sosio-ekonomi dan demografi. Migrasi internasional merupakan cara yang efektif untuk rumahtangga berpendapatan rendah dengan cepat mengatasi kekurangan pendapatan. Dari perspektif makro, remitansi berkontribusi terhadap pemerataan distribusi pendapatan antar rumahtangga yang memiliki pekerja migran.

Ahlburg (1996) juga melakukan penelitian untuk mengetahui dampak remitansi terhadap distribusi pendapatan di Tonga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remitansi membuat distribusi pendapatan di Tonga pada pertengahan tahun 1980 lebih merata. Karena pada

umumnya negara-negara Pasifik mendukung keyakinan yang lebih egaliter, temuan ini memberikan dukungan bahwa pemerintah minimal harus mengakomodasi migrasi dan remitansi. Sebagian negara Pasifik telah membahas kebijakan pajak remitansi, pembentukan rekening valuta asing khusus untuk pekerja migran, menawarkan obligasi yang menguntungkan dan sebagainya. Jika remitansi memiliki dampak yang bermanfaat untuk distribusi pendapatan, maka pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mendukung atau setidaknya tidak menghalangi migrasi. Jika pemerintah memutuskan untuk berperan aktif dalam mendorong migrasi dapat ditempuh dengan cara mendukung atau mensubsidi migrasi pekerja berpendidikan rendah dan tidak terampil.

Perbedaan hasil penelitian dampak remitansi terhadap ketimpangan pendapatan mendorong Ebeke dan Goff (2009) melakukan penelitian yang menguji hubungan antara pengiriman uang (remitansi) dan ketimpangan pendapatan di negara berkembang. Penelitian tersebut juga ditujukan untuk menjawab pertanyaan mengapa remitansi di sebagian negara dapat menurunkan ketimpangan namun di sebagian negara lainnya justru meningkatkan ketimpangan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dampak ambigu remitansi terhadap ketimpangan pendapatan disebabkan oleh ketidaksetaraan tingkat pembangunan, perbedaan biaya migrasi dan tingkat keahlian dari pekerja migran. Jika pekerja migran berasal dari kelompok rumahtangga yang memiliki ketrampilan tinggi (terdidik), maka remitansi akan mempertahankan ketimpangan yang sudah ada. Sebaliknya jika pekerja migran berasal dari kelompok rumahtangga yang memiliki ketrampilan rendah, maka remitansi akan mengurangi ketimpangan pendapatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan migrasi terhadap distribusi pendapatan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang paling efektif berpengaruh terhadap distribusi pendapatan di Indonesia. Untuk menggambarkan transmisi tersebut digunakan pendekatan model Sistem Neraca Nasional Ekonomi (SNSE) yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tahun 2008 dan penghitungan indeks Theil. SNSE merupakan salah satu sistem pendataan dan juga alat analisa penting yang dikembangkan untuk memantau dan menganalisa berbagai masalah kemiskinan dan distribusi pendapatan di berbagai negara.

SNSE merupakan suatu sistem pendataan yang baik karena (1) SNSE merangkum seluruh kegiatan transaksi ekonomi yang terjadi di suatu perekonomian dalam kurun waktu tertentu, dengan demikian SNSE dapat dengan mudah memberikan gambaran umum mengenai perekonomian suatu wilayah. (2) SNSE memotret struktur sosial ekonomi suatu perekonomian, dengan demikian SNSE dapat memberikan

gambaran tentang kemiskinan dan distribusi pendapatan di perekonomian tersebut.

SNSE juga merupakan alat analisa yang penting karena (1) analisa menggunakan SNSE dapat menunjukkan dengan baik dampak dari suatu kebijakan ekonomi terhadap pendapatan masyarakat, dengan demikian dapat diketahui dampak dari suatu kebijakan ekonomi terhadap masalah kemiskinan dan distribusi pendapatan. (2) analisa menggunakan SNSE relatif sederhana, sehingga penerapannya dapat dilakukan dengan mudah di berbagai negara.

Analisis multiplier

Di dalam model SNSE, analisis multiplier dapat dibagi dalam dua bagian besar yaitu *accounting multiplier* (pengganda neraca) dan *fixed price multiplier* (pengganda harga tetap). Analisis *accounting multiplier* pada prinsipnya sama dengan *multiplier* pada matriks *invers Leontif* yang diuraikan dalam model input output. Hal ini berarti semua analisis multiplier yang digunakan dalam model input output seperti *own multiplier*, *other linkage multiplier* dan *total multiplier* dapat juga diterapkan dalam analisis *accounting multiplier* dalam model SNSE. Sedangkan analisis *fixed price multiplier* menjurus pada pengukuran respon rumahtangga terhadap perubahan neraca eksogen yang memperhitungkan *expenditure propensity*.

Selanjutnya multiplier SNSE dihitung dengan menggunakan matriks invers Leontif yang mencakup seluruh neraca endogen dengan rumus sebagai berikut :

$$M^{SNSE} = (I - A_{ij})^{-1} \quad (1)$$

Dimana $A_{ij} = T_{ij}/Y_j$, T_{ij} menunjukkan transaksi antar neraca pada kolom penerimaan ke-i dan baris pengeluaran ke-j dan Y_j menunjukkan total pengeluaran kolom ke-j.

Melalui matriks multiplier SNSE, kita dapat melakukan berbagai algoritma untuk memperoleh bermacam-macam jenis multiplier ekonomi yang dapat dipakai untuk menggambarkan seberapa besar hubungan antara aktivitas ekonomi dalam perekonomian secara menyeluruh.

Dalam penelitian ini analisis multiplier utamanya digunakan untuk mengetahui *household income multiplier* (pengganda pendapatan rumahtangga) yaitu besaran *multiplier* yang menunjukkan berapa besar pengaruh dari *shock* eksogen berupa berbagai kebijakan penempatan tenaga kerja ke luar negeri yang diambil oleh pemerintah terhadap perubahan pendapatan rumahtangga dalam blok institusi.

Untuk melakukan simulasi kebijakan yang dimaksud, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\Delta Y = M^{SNSE} \Delta X$$

(2)

Dimana, ΔY menunjukkan besarnya perubahan pendapatan rumahtangga, ΔX merupakan besarnya perubahan shock kebijakan dan M^{SNSE} adalah matriks multiplier SNSE. Adapun variabel-variabel eksogen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan-kebijakan migrasi yaitu kebijakan yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan penerimaan remitansi sekaligus melindungi keamanan dan keselamatan kerja TKI (Rakernis BNP2TKI, 2013), yang dijabarkan melalui simulasi simulasi sebagai berikut :

- Simulasi 0 (base line), yaitu kondisi awal selama tahun 2008 tanpa adanya kebijakan.
- Simulasi 1, target peningkatan penempatan TKI dari 494.609 orang pada tahun 2012 meningkat 21% menjadi 600.000 orang pada tahun 2013.
Peningkatan ini mengakibatkan injeksi remitansi sebesar Rp 14,2 triliun.
- Simulasi 2, kebijakan pembatasan (moratorium) TKI informal ke beberapa negara Timur Tengah dan Malaysia. Kebijakan ini mengakibatkan penurunan penerimaan remitansi sebesar Rp 3,1 triliun.
- Simulasi 3, kebijakan peningkatan TKI formal sebesar 35,44% akan memberikan dampak peningkatan remitansi sebesar Rp 14,6 triliun.
- Simulasi 4, kebijakan pemberian kredit usaha rakyat (KUR) kepada TKI purna dan Balai Latihan Kerja (BLK) dengan tujuan untuk pemberdayaan kewirausahaan sebesar Rp 10,8 triliun.
- Simulasi 5, Program pembinaan kursus dan pelatihan bagi TKI yang sudah terdaftar tetapi tidak dapat diberangkatkan sebagai kompensasi dari kebijakan moratorium penempatan TKI informal, dana berasal dari Dinas Pendidikan sebesar Rp 21 miliar.
- Simulasi 6, gabungan simulasi 1-5 yang menunjukkan simulasi untuk semua kebijakan yang berkaitan dengan penempatan TKI (paket kebijakan).

Analisis Indeks Theil

Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan, antara lain (1) *Lorenz Curve* yang mengukur ketimpangan berdasarkan bentuk kurva distribusi pendapatan, (2) *Gini Ratio* yang mengukur ketimpangan berdasarkan luas *Lorenz Curve*, (3) *Generalized Entropy Measure* (GEM) atau lebih dikenal dengan *Theil Index* yang merupakan ukuran ketimpangan yang dikembangkan dari model ketimpangan yang dikenalkan oleh Theil pada tahun 1967, (4) *L index*

yang merupakan pengembangan dari *Theil Index* dan (5) *Williamson Index* yang sebenarnya sama dengan ukuran ketimpangan secara statistik koefisien variasi (Daryanto dan Hafizrianda, 2010).

Suatu ukuran ketimpangan atau disparitas yang baik harus memenuhi berbagai asumsi atau kriteria, antara lain (1) *Mean Independence* yaitu jika semua pendapatan dilipatgandakan maka ukuran disparitas tidak berubah, (2) *Population Size Independence* yaitu jika jumlah penduduk berubah maka ukuran disparitas tidak berubah dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*), (3) *Symmetry* yaitu jika terjadi pertukaran pendapatan maka ukuran disparitas tidak berubah, (4) *Pigou-Dalton Transfer Sensitivity* dimana transfer pendapatan dari yang kaya ke yang miskin akan mengurangi disparitas, (5) *Decomposability* yaitu disparitas dapat diuraikan berdasarkan pengelompokan penduduk atau sumber-sumber pendapatan dan dimensi lainnya, serta (6) *Statistical Testability* yaitu uji signifikansi dari perubahan sepanjang waktu (BPS, 2012).

Alat ukur ketimpangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Indeks Theil. Indeks Theil merupakan ukuran disparitas terbaik karena memenuhi semua kriteria ukuran disparitas yang telah disebutkan dan dapat didekomposisikan untuk melihat ketimpangan dalam (*within*) kelompok rumahtangga itu sendiri yaitu dalam kelompok rumahtangga pertanian atau kelompok rumahtangga non pertanian, dan ketimpangan antar (*between*) kelompok rumahtangga yaitu antara kelompok rumahtangga pertanian dan non pertanian. Indeks Theil memiliki kecenderungan dapat mewakili arah indeks L dan juga representative untuk menggambarkan angka gini ratio yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan arah fluktuasi dari nilai gini ratio kelihatan sama persis dengan arah fluktuasi indek Theil seperti telah dibuktikan Akita et al. (1999) ketika menjelaskan fenomena ketimpangan pendapatan rumahtangga di Indonesia.

Untuk mengukur ketimpangan dengan indeks Theil menggunakan rumus sebagai berikut :

$$T = \sum_i \sum_j \left(\frac{y_{ij}}{Y} \right) \ln \left(\frac{y_{ij}/Y}{n_{ij}/n} \right) \quad (4)$$

Dimana Y_{ij} merupakan total pendapatan rumahtangga dalam klasifikasi j untuk kelompok i , Y adalah total pendapatan untuk semua rumahtangga, n_{ij} adalah jumlah rumahtangga dalam klasifikasi j untuk kelompok i dan n adalah jumlah seluruh rumahtangga, j menunjukkan klasifikasi delapan kelompok rumahtangga yaitu rumahtangga buruh pertanian, rumahtangga pengusaha pertanian, rumahtangga pengusaha bebas golongan rendah di pedesaan dan perkotaan, rumahtangga bukan angkatan kerja di pedesaan dan perkotaan, rumahtangga pengusaha bebas golongan atas di pedesaan dan perkotaan. i menunjukkan kalisifikasi rumahtangga pertanian dan non pertanian.

Dekomposisi indeks Theil menjadi komponen dalam kelompok (within) dan antar kelompok (between) ditunjukkan dengan rumus sebagai berikut :

Ketimpangan total = Ketimpangan kelompok + Ketimpangan antar kelompok

$$T = \sum_i \left(\frac{Y_i}{Y} \right) T_i + \sum_i \left(\frac{Y_i}{Y} \right) \ln \left(\frac{Y_i/Y}{n_i/n} \right) = T_w + T_b \quad (5)$$

Dimana : $T_i = \sum_i \left(\frac{Y_i}{Y} \right) \ln \left(\frac{Y_i/Y}{n_i/n} \right)$

Indeks Theil digunakan untuk mengukur ketimpangan baik dalam struktur penerimaan atau pengeluaran awal dalam kerangka model SNSE 2008 (*base line*) maupun struktur penerimaan atau pengeluaran SNSE hasil simulasi kebijakan. Melalui cara ini dapat diketahui seberapa jauh kebijakan penempatan tenaga kerja yang diambil mampu menurunkan angka ketimpangan pendapatan dari posisi *base line*.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Perekonomian Indonesia Tahun 2008

Matriks SNSE 2008 menunjukkan bahwa output yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi pada tahun 2008 lebih banyak diperoleh dari penjualan input antara dan penjualan barang dan jasa sebagai konsumsi akhir. Dari sisi penggunaan, output yang dihasilkan digunakan untuk biaya antara dan biaya faktor produksi (tenaga kerja dan modal). Dari total output sebesar Rp. 10.371,29 triliun, 50,31% merupakan input antara dan 49,27% merupakan Nilai Tambah Bruto (NTB). NTB bila ditambah dengan pajak tak langsung dan dikurangi dengan subsidi merupakan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp. 5.153,14 triliun.

Tabel 1. Struktur perekonomian Indonesia tahun 2008

Uraian	Nilai (Miliar Rupiah)	Persentase
Input antara	5.218.149,26	50,31
Pendapatan faktor produksi tenaga kerja	2.692.617,74	25,96
Pendapatan faktor produksi bukan tenaga kerja	2.464.317,45	23,76
Pajak tak langsung	237.098,56	2,29
Subsidi	-240.891,47	-2,32
Jumlah	10.371.291,54	100,00

Sumber : SNSE 2008

Tabel 1. Menunjukkan bahwa dari keseluruhan komponen pembentuk PDB yaitu pendapatan faktor produksi tenaga kerja, pendapatan faktor produksi bukan tenaga kerja dan pajak tak langsung neto, pendapatan faktor produksi tenaga kerja merupakan penyumbang terbesar dengan persentase sebesar 52,25%. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur perekonomian Indonesia masih bersifat *labor intensif* (padat karya), dimana dalam suatu proses produksi input terbesar yang diperlukan adalah tenaga kerja.

Balas jasa faktor produksi tenaga kerja dan faktor produksi bukan tenaga kerja diterima oleh rumahtangga sebagai pendapatan dalam bentuk upah/gaji dan pendapatan atas kepemilikan modal (modal). Selain itu rumahtangga juga memperoleh pendapatan yang berasal dari transfer, baik transfer dari pemerintah, perusahaan, antar rumahtangga maupun transfer pendapatan dari luar negeri (remitansi).

Total pendapatan yang diterima oleh rumahtangga sebagian besar digunakan untuk konsumsi dengan rata-rata pengeluaran sebesar 87%, sisanya dialokasikan untuk pengeluaran lainnya seperti pembayaran pajak, bunga dan transfer antar rumahtangga. Selisih antara pendapatan dan pengeluaran kemudian dicatat sebagai tabungan rumahtangga. Alokasi pendapatan institusi berdasarkan SNSE 2008 dapat dilihat pada tabel 2. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa upah/gaji merupakan sumber pendapatan utama untuk setiap kelompok rumahtangga, pendapatan terbesar kedua adalah pendapatan dari kepemilikan modal dan kemudian transfer. Namun untuk kelompok rumahtangga buruh pertanian pendapatan dari kepemilikan modal hanya sebesar 6,45% total pendapatan, sehingga untuk menunjang kesejahteraannya masih diperlukan transfer utamanya transfer dari pemerintah. Institusi perusahaan sumber utama pendapatan berasal dari kepemilikan modal sebesar 83,02% dan pendapatan utama institusi pemerintah berasal transfer antar institusi dalam hal ini adalah pajak sebesar 99,82% total pendapatan.

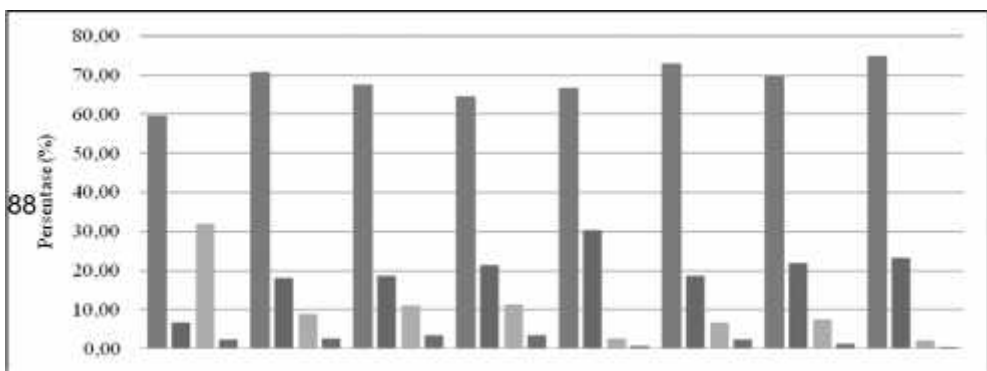
Tabel 2. Alokasi pendapatan institusi tahun 2008

	Institusi	Faktor produksi		Transfer		Jumlah
		Tenaga kerja	Bukan tenaga kerja	Institusi	Luar negeri	
Total	Rumahtangga	2,688,905.27	788,549.94	285,483.49	63,505.87	3,826,444.57
	%	70.27	20.61	7.46	1.66	100.00
Pertanian	RT buruh pertanian	105,406.45	11,397.23	56,126.23	3,826.77	176,756.68
	%	59.63	6.45	31.75	2.16	100.00
	RT pengusaha pertanian	518,425.74	132,332.16	63,781.64	17,023.29	731,562.84
	%	70.87	18.09	8.72	2.33	100.00
Bukan pertanian	RT gol. Rendah di pedesaan	333,694.87	91,317.66	53,868.14	15,353.55	494,234.22
	%	67.52	18.48	10.90	3.11	100.00
	RT bukan angkatan kerja di pedesaan	111,674.32	36,819.53	19,161.56	5,496.46	173,151.87
	%	64.50	21.26	11.07	3.17	100.00
	RT gol. Atas di pedesaan	312,663.70	141,625.00	11,826.69	2,339.13	468,454.52
	%	66.74	30.23	2.52	0.50	100.00
	RT gol. Rendah di perkotaan	517,690.73	150,554.07	46,832.07	15,418.61	710,495.47
	%	72.86	18.38	6.59	2.17	100.00
	RT bukan angkatan kerja di perkotaan	170,650.09	52,785.03	18,132.19	2,338.17	243,905.49
	%	69.97	21.64	7.43	0.96	100.00
RT gol. Atas di perkotaan	618,699.38	191,719.25	15,754.97	1,709.89	827,883.49	
%	74.73	23.16	1.90	0.21	100.00	

Pendapatan yang bersumber dari kepemilikan modal pada umumnya dimiliki oleh kelompok rumahtangga golongan atas baik di pedesaan maupun perkotaan dengan persentase sebesar 23% - 30% dari total pendapatan masing-masing kelompok rumahtangga. Keterbatasan akses terhadap kepemilikan faktor menyebabkan kelompok rumahtangga golongan bawah seperti kelompok rumahtangga pertanian dan rumahtangga golongan rendah di pedesaan dan perkotaan melakukan migrasi ke luar negeri dan mengirimkan sebagian pendapatannya kepada keluarga yang ditinggalkan. Hal ini menjadikan pendapatan kelompok rumahtangga tersebut yang berasal dari transfer luar negeri (remitansi) relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok rumahtangga lainnya.

Gambar 2 menunjukkan alokasi pendapatan untuk setiap kelompok rumahtangga. Kelompok rumahtangga buruh tani, rumahtangga bukan angkatan kerja pedesaan dan rumahtangga bukan angkatan kerja perkotaan mendapatkan balas jasa faktor produksi tenaga kerja (upah/gaji) lebih rendah dibandingkan dengan kelompok rumahtangga lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok rumahtangga tersebut bekerja di sektor informal yang menerima upah/gaji lebih rendah. Pada tahun 2008, rata-rata balas jasa faktor produksi (upah/gaji) tenaga kerja kelompok rumahtangga buruh pertanian sebesar Rp.105,41 triliun, kelompok rumahtangga bukan angkatan kerja pedesaan sebesar Rp.111,67 triliun dan kelompok rumahtangga bukan angkatan kerja perkotaan sebesar Rp.170,65 triliun, sedangkan kelompok rumahtangga lainnya menerima balas jasa faktor produksi lebih tinggi.



Gambar 2. Alokasi pendapatan rumahtangga tahun 2008

Sumber : SNSE 2008, (diolah)

Analisis Pengganda Neraca

Salah satu jenis analisis umum yang dapat digunakan untuk menganalisis keterkaitan antar variabel dalam Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) adalah analisis *multiplier* (pengganda). Analisis ini mencoba melihat dampak yang akan terjadi terhadap variabel-variabel endogen tertentu apabila terjadi perubahan pada neraca eksogen seperti terjadinya peningkatan produktivitas di sektor produksi atau peningkatan dan penurunan transfer pendapatan dari pemerintah, swasta atau transfer luar negeri kepada kelompok rumahtangga.

Dalam penelitian ini injeksi berawal dari perubahan pendapatan pada blok institusi yang berasal dari luar negeri (remitansi). Dampak injeksi remitansi terhadap perekonomian dapat dilihat terhadap peningkatan pendapatan institusi utamanya rumahtangga, peningkatan output di sektor produksi sebagai akibat dari meningkatnya konsumsi rumahtangga dan kenaikan alokasi nilai tambah bagi faktor produksi.

Peningkatan permintaan di sektor produksi sebagai akibat adanya injeksi pendapatan sebesar satu satuan unit pada setiap kelompok rumahtangga terangkum dalam nilai pengganda pada tabel 3. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa peranan kelompok rumahtangga pertanian terhadap peningkatan produksi sektoral lebih tinggi dibanding kelompok rumahtangga lainnya. Adanya injeksi pendapatan pada kelompok rumahtangga akan memberikan dampak permintaan yang tinggi terhadap produk perdagangan, restoran dan perhotelan dengan nilai pengganda sebesar 0,7973 - 0,9099, produk industri makanan dan minuman sebesar 0,5215-0,7387 dan produk pertanian tanaman pangan sebesar 0,2621 - 0,4525. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan sebesar Rp 1 miliar yang diinjeksikan kepada kelompok rumahtangga tersebut akan meningkatkan pengeluaran konsumsi rumahtangga untuk produk perdagangan, restoran dan perhotelan sekitar Rp. 0,797 miliar-Rp. 0,909 miliar, produk

industri makanan dan minuman sebesar Rp. 0,512 miliar-Rp 0,7387 miliar, dan produk tanaman pangan sebesar Rp. 0,2621 miliar-Rp. 0,4255 miliar.

Peningkatan pada sektor produksi selanjutnya akan memberikan pengaruh positif terhadap alokasi pendapatan faktor produksi. Peningkatan pendapatan pada faktor produksi akan berpengaruh terhadap pendapatan institusi (rumah tangga, perusahaan dan pemerintah).

Tabel 3. Dampak peningkatan pendapatan rumah tangga terhadap sektor produksi

Sektor Produksi	Rumah tangga							
	Pertanian		Bukan Pertanian					
	Buruh	Pengusaha Pertanian	Pedesaan			Perkotaan		
			Pengusaha golongan rendah	Bukan angkatan kerja	Pengusaha golongan atas	Pengusaha golongan rendah	Bukan angkatan kerja	Pengusaha golongan atas
PTP	0.4255	0.3599	0.3428	0.3243	0.2761	0.3194	0.3002	0.2621
PTL	0.1007	0.0880	0.0900	0.0860	0.0763	0.0851	0.0824	0.0742
PTR	0.2133	0.1862	0.2012	0.1867	0.1666	0.1905	0.1774	0.1573
HUTBUN	0.0102	0.0100	0.0101	0.0086	0.0096	0.0089	0.0085	0.0090
PRK	0.1477	0.1353	0.1488	0.1328	0.1230	0.1296	0.1289	0.1151
PTB	0.0968	0.0973	0.1025	0.1093	0.0984	0.0994	0.1053	0.0961
INMAK	0.7387	0.6267	0.6160	0.5921	0.5313	0.6032	0.5812	0.5215
INTKS	0.0993	0.0982	0.1100	0.1090	0.0898	0.0968	0.0932	0.0864
INKAY	0.0354	0.0327	0.0394	0.0276	0.0334	0.0335	0.0252	0.0323
INKRTS	0.3826	0.3911	0.3949	0.4039	0.3904	0.4312	0.4257	0.4205
INPPK	0.4135	0.4137	0.4374	0.4732	0.4193	0.4134	0.4525	0.4006
LGA	0.0409	0.0444	0.0475	0.0495	0.0448	0.0491	0.0439	0.0476
KONS	0.0307	0.0299	0.0312	0.0309	0.0289	0.0315	0.0296	0.0286
PERDAG	0.8697	0.8463	0.8663	0.9099	0.8114	0.8919	0.8624	0.7973
ANGKOM	0.2824	0.3058	0.3068	0.3078	0.2942	0.3023	0.2948	0.2885
KPJ	0.2103	0.2122	0.2344	0.2110	0.2162	0.2415	0.2080	0.2198
JASA	0.3593	0.3117	0.3438	0.3281	0.2801	0.3497	0.2856	0.3036

Sumber : SNSE 2008 (diolah)

Dampak kebijakan penempatan tenaga kerja ke luar negeri

Peningkatan pendapatan rumah tangga sebagai akibat dari injeksi penerimaan remitansi disimulasikan dalam 6 simulasi kebijakan. Sebagai respon dari banyaknya kejadian kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, pemerintah mengambil beberapa langkah antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan (*moratorium*) penempatan tenaga kerja Indonesia ke beberapa negara Timur Tengah dan Malaysia. Dari berbagai simulasi yang dilakukan, dapat diamati dampak kebijakan terhadap perubahan pendapatan rumah tangga seperti terlihat pada tabel 4.

Berdasarkan tabel 4, terlihat bahwa berbagai simulasi kebijakan yang dilakukan mampu meningkatkan pendapatan dari seluruh kelompok rumah tangga (simulasi 1, simulasi 3, simulasi 4, simulasi 5 dan simulasi 6). Kebijakan yang memberikan dampak terhadap peningkatan

pendapatan rumah tangga pekerja migran terbesar adalah simulasi kebijakan 6 yaitu simulasi dari semua kebijakan yang berkaitan dengan TKI. Kebijakan untuk membatasi pengiriman TKI di sektor informal kemudian diimbangi dengan kompensasi pemberian program pelatihan dan kursus kepada TKI yang sudah terdaftar namun gagal diberangkatkan. Peningkatan ketrampilan yang diperoleh dari program pelatihan dan kursus ini akan menyebabkan peningkatan jumlah TKI berketrampilan, selanjutnya akan meningkatkan penempatan TKI di sektor formal. Pemberian modal bagi TKI yang telah purna mendorong penciptaan usaha dan lapangan kerja baru. Paket kebijakan ini memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga utamanya kelompok rumah tangga pertanian dan rumah tangga non pertanian golongan rendah di pedesaan.

Kelompok rumahtangga yang paling terpengaruh adalah kelompok rumahtangga pertanian baik buruh pertanian maupun rumahtangga pengusaha pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri berasal dari kelompok rumahtangga ini. Buruh tani sebagai salah satu komponen pada sektor pertanian, mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan sektor pertanian. Namun pada kenyataannya, keberhasilan sektor pertanian tidak selalu diikuti oleh meningkatnya kesejahteraan buruh tani terutama dalam situasi perekonomian Indonesia saat ini. Semakin sempitnya lahan pertanian dan tingginya tingkat konversi lahan serta relatif kecilnya pendapatan mendorong rumahtangga pertanian melakukan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara menjadi pekerja migran.

Tabel 4. Simulasi Dampak Kebijakan Penempatan TKI terhadap Pendapatan rumah tangga (Rp miliar)

Simulasi kebijakan	Pendapatan rumahtangga							
	Pertanian		Bukan Pertanian					
	Buruh	Pengusaha	Pedesaan			Perkotaan		
			RT gol. Rendah	Bukan angkatan kerja	RT gol. Atas	RT gol. Rendah	Bukan angkatan kerja	RT gol. Atas
<i>Base line</i>	176 756.68	31 562.84	494	173	468	710	243	827
Simulasi 1 Dampak	1 259.75	5 567.67	3 512.78	1 280.18	3 386.14	5 110.18	1 727.37	5 882.72
%	0,7127	0,7611	0,7107	0,7393	0,7228	0,7192	0,7082	0,7106
Simulasi 2 Dampak	-1 302.75	-5 757.70	-3 632.68	-1 323.87	-3 501.71	-5 284.60	-1 786.33	-6 083.50
%	-0,7370	-0,7870	-0,7350	-0,7646	-0,7475	-0,7438	-0,7324	-0,7348
Simulasi 3 Dampak	1 294.15	5 719.70	3 608.70	1 315.13	3 478.60	5 249.72	1 774.54	6 043.34
%	0,7322	0,7818	0,7302	0,7595	0,7426	0,7389	0,7276	0,73
Simulasi 4 Dampak	953,29	2 797.68	1 831.16	651,85	1 415.84	2 434.78	844,58	2 538.88
%	0,5393	0,3824	0,3705	0,3765	0,3022	0,3427	0,3463	0,3067
Simulasi 5 Dampak	2,9	9,18	6	2,1	5,78	9,6	3,25	11,33
Simulasi 6 Dampak	2 249.53	8 526.56	5 445.86	1 969.09	4 900.21	7 694.10	2 622.37	8 593.55
%	1,2727	1,1655	1,1019	1,1372	1,046	1,0829	1,0752	1,038

Sumber : SNSE 2008 (diolah)

Ket :

Simulasi 1 : Peningkatan penempatan TKI dalam keadaan normal sebesar 21%

Simulasi 2 : Moratorium penempatan TKI sebesar 26%

Simulasi 3 : Peningkatan penempatan TKI di sektor formal sebesar 35.44%

Simulasi 4 : Program KUR dan BLK

Simulasi 5 : Program pembinaan kursus dan pelatihan ketrampilan

Simulasi 6 : Paket kebijakan

Simulasi kebijakan yang kedua adalah kebijakan pembatasan (moratorium) penempatan TKI. Hasil simulasi kebijakan menunjukkan bahwa pembatasan penempatan TKI sektor informal akan berdampak kepada menurunnya distribusi pendapatan rumahtangga. Penurunan penempatan TKI sektor informal sebesar 26% memberikan dampak terhadap penurunan distribusi pendapatan rumah tangga 0,73% - 0,78%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang juga menghasilkan satu kesimpulan bahwa pengiriman uang (remitansi) dari para pekerja migran berkontribusi dalam berbagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan rumahtangga di daerah atau negara asal. Adam (1996) dalam penelitiannya tentang pengaruh dari pengiriman uang (remitansi) terhadap distribusi pendapatan, memperoleh kesimpulan bahwa remitansi memiliki efek positif terhadap distribusi pendapatan dan akumulasi aset di daerah pedesaan.

Serangkaian penelitian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) pada beberapa negara di Asia tentang peran remitansi pada level global menghasilkan kesimpulan bahwa remitansi signifikan meningkatkan pendapatan rumahtangga. Pendapatan rumahtangga yang meningkat akan berpengaruh terhadap daya beli dan mendorong konsumsi, selanjutnya juga dapat menurunkan kemiskinan. Remitansi juga memainkan peran penting dalam pembiayaan perawatan kesehatan dan pendidikan anggota keluarga yang berkontribusi pada peningkatan *human capital*.

Analisis ketimpangan pendapatan rumahtangga

Dengan mengetahui dampak kebijakan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang diambil oleh pemerintah melalui berbagai simulasi simulasi kebijakan yang telah dibahas sebelumnya, dapat diketahui besarnya perubahan pendapatan dari masing-masing rumahtangga untuk dianalisis lebih lanjut. Analisis selanjutnya adalah analisis peran remitansi terhadap perubahan ketimpangan pendapatan rumahtangga di Indonesia. Ketimpangan pendapatan baik antar individu,

antar rumahtangga maupun antar wilayah merupakan masalah yang serius, karena bisa membawa dampak negatif bagi stabilitas ekonomi, politik maupun sosial. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui perubahan ketimpangan pendapatan rumahtangga digunakan alat analisis Indeks Theil.

Indeks Theil sebagai salah satu ukuran disparitas terbaik memiliki kriteria *size independence*, dimana ukuran ketimpangan tidak terpengaruh dari besaran perubahan pendapatan atau penduduk. Dengan kata lain, jika jumlah pendapatan atau penduduk berubah, maka ukuran disparitas seharusnya tidak berubah jika kondisi lainnya tetap (*ceteris paribus*). Indeks Theil juga dapat didekomposisi menurut ketimpangan dalam kelompok (*within*) dan ketimpangan antar kelompok (*between*) yang apabila keduanya dijumlahkan akan menghasilkan ketimpangan menyeluruh (*all group*) (Daryanto, 2010).

Tabel 5 menunjukkan hasil penghitungan Indeks Theil. Simulasi 2 yaitu kebijakan pembatasan (moratorium) penempatan TKI mengakibatkan peningkatan angka ketimpangan dari kondisi awal, artinya kebijakan tersebut justru memperparah kesenjangan penerimaan pendapatan antara kedua kelompok rumah tangga. Simulasi 2 meningkatkan kesenjangan karena tenaga kerja yang memiliki ketrampilan rendah pada umumnya berasal dari kelompok rumah tangga pertanian. Pembatasan penempatan TKI sektor informal sama artinya dengan membatasi kesempatan kelompok rumah tangga tersebut untuk mendapatkan pekerjaan dan gaji yang lebih baik, sehingga berdampak pada semakin meningkatnya kesenjangan antara kelompok rumah tangga pertanian dan non pertanian.

Simulasi 6 yaitu gabungan dari seluruh kebijakan mampu menurunkan angka ketimpangan dari kondisi awal, artinya kebijakan tersebut mampu mengurangi kesenjangan penerimaan pendapatan antara kelompok rumah tangga pertanian dengan kelompok rumah tangga non pertanian. Program pelatihan dan kursus meningkatkan ketrampilan TKI, sehingga membuka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal dan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi.

Tabel 5. Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga Indeks Theil

Ketimpangan pendapatan rumahtangga indeks Theil

simulasi	Indeks Theil			Rangking
	<i>Within</i>	<i>Between</i>	<i>All group</i>	
<i>Base line</i>	0,0781	0,0626	0,1407	
simulasi 1	0,0781	0,0626	0,1407	3
simulasi 2	0,0781	0,0627	0,1408	4
simulasi 3	0,0781	0,0626	0,1407	3
simulasi 4	0,0779	0,0625	0,1405	2
simulasi 5	0,0781	0,0626	0,1407	3
simulasi 6	0,0780	0,0625	0,1404	1

Sumber : SNSE 2008 (diolah)

Ket :

Simulasi 1 : Peningkatan penempatan TKI dalam keadaan normal sebesar 21%

Simulasi 2 : Moratorium penempatan TKI sebesar 26%

Simulasi 3 : Peningkatan penempatan TKI di sektor formal sebesar 35.44%

Simulasi 4 : Program KUR dan BLK

Simulasi 5 : Program pembinaan kursus dan pelatihan ketrampilan

Simulasi 6 : Paket kebijakan

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan untuk menguji hubungan antara penerimaan remitansi dan ketimpangan pendapatan. Ebeke dan Goff (2009) melakukan penelitian untuk menguji hubungan antara pengiriman uang (remitansi) dan ketimpangan pendapatan di negara berkembang dan mengapa remitansi di sebagian negara dapat menurunkan ketimpangan namun di sebagian negara lainnya justru meningkatkan ketimpangan.

Dampak ambigu remitansi terhadap ketimpangan pendapatan disebabkan oleh ketidaksetaraan tingkat pembangunan, perbedaan biaya migrasi dan tingkat keahlian dari pekerja migran. Jika pekerja migran berasal dari kelompok rumahtangga yang memiliki ketrampilan tinggi (terdidik), maka remitansi akan mempertahankan ketimpangan yang sudah ada.

Sebaliknya jika pekerja migran berasal dari kelompok rumahtangga yang memiliki ketrampilan rendah, maka remitansi akan mengurangi ketimpangan pendapatan. Karakteristik utama dari sebuah negara dimana remitansi dapat mengurangi ketimpangan pendapatan adalah pendapatan rata-rata negara tinggi, biaya migrasi rendah dan migrasi *brain drain* juga rendah.

Ahlburg (1996) melakukan penelitian untuk menguji apakah penerimaan remitansi dapat menurunkan ketimpangan di negara Tonga. Pengukuran ketimpangan dilakukan dengan cara mengukur derajat ketimpangan distribusi pendapatan yang mencakup pengukuran *Mean Logarithmic Deviation* (MLD), indeks entropy dan koefisien gini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan remitansi dari para migrant yang bekerja di luar negeri dapat menurunkan ketimpangan pendapatan. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi arus migrasi atau remitansi harus mempertimbangkan dampak terhadap distribusi pendapatan.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan penempatan TKI terhadap distribusi pendapatan di Indonesia dan memberikan rekomendasi kebijakan yang paling efektif berpengaruh

terhadap distribusi pendapatan. Peningkatan penempatan TKI ke luar negeri utamanya penempatan TKI di sektor formal mampu meningkatkan penerimaan remitansi yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap distribusi pendapatan rumah tangga dan perekonomian negara. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Kebijakan peningkatan penempatan TKI, program pelatihan dan kursus serta program pemberian kredit usaha dan pelatihan kewirausahaan bagi TKI memberikan dampak terhadap peningkatan distribusi pendapatan rumah tangga, penerimaan pemerintah dan perekonomian negara. Selanjutnya hasil penghitungan indeks Theil menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan (moratorium) penempatan TKI yang diikuti oleh program pelatihan dan kursus untuk TKI sektor informal yang gagal diberangkatkan, serta program kredit usaha dan pelatihan kewirausahaan bagi TKI purna mampu menurunkan angka ketimpangan dari *base line*. Simulasi kebijakan program kredit usaha dan pelatihan kewirausahaan bagi TKI purna tanpa diikuti oleh kebijakan lainnya juga mampu menurunkan angka ketimpangan dari *base line*, artinya kedua simulasi tersebut mampu mengurangi kesenjangan penerimaan pendapatan antara kelompok rumah tangga pertanian dengan kelompok rumah tangga non pertanian.

Sedangkan kebijakan peningkatan penempatan TKI dalam keadaan normal (tanpa adanya pembatasan), kebijakan penempatan TKI formal dan kebijakan program pelatihan dan kursus tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Kebijakan pembatasan (moratorium) penempatan TKI memberikan dampak terhadap penurunan distribusi pendapatan rumah tangga, penerimaan pemerintah dan perekonomian negara, simulasi ini juga berdampak pada meningkatnya angka ketimpangan artinya kesenjangan pendapatan antara kelompok rumah tangga pertanian dan non pertanian semakin tinggi.

2. kebijakan pembatasan (moratorium) penempatan TKI yang diikuti oleh program pelatihan dan kursus untuk TKI sektor informal yang gagal diberangkatkan, serta program kredit usaha dan pelatihan kewirausahaan bagi TKI purna memberikan dampak terbaik dan paling efektif berpengaruh terhadap distribusi pendapatan rumah tangga utamanya rumah tangga pertanian, sehingga simulasi ini juga dapat menurunkan angka ketimpangan dari *base line* yaitu dari 0.1407 menjadi 0.1404. Meskipun penurunan angka ketimpangan terbilang sangat kecil, namun paling tidak kondisi ini telah memberikan gambaran bahwa paket kebijakan tersebut mampu mengurangi ketimpangan yang ada.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, target pemerintah untuk meningkatkan penerimaan remitansi

harus mempertimbangkan dampak terhadap distribusi pendapatan rumah tangga sehingga tidak mengakibatkan semakin tingginya ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

- Meningkatkan ketrampilan tenaga kerja utamanya tenaga kerja yang memiliki ketrampilan rendah melalui program pelatihan dan kursus. Program pelatihan sebaiknya disesuaikan dengan *job order* yang tersedia menurut negara tujuan, sehingga TKI tersebut bisa mendapatkan pekerjaan di sektor formal dengan gaji yang lebih tinggi serta terjamin keamanan dan kesejahteraannya. Peningkatan ketrampilan ini juga akan meningkatkan daya saing TKI dengan tenaga kerja dari negara-negara lainnya.
- Mendorong usaha kecil dan menengah melalui pelatihan kewirausahaan dan ketrampilan. Umumnya TKI yang telah menyelesaikan kontraknya dan kembali ke tempat asal kurang mendapat pengetahuan yang memadai untuk memanfaatkan pendapatan yang diperoleh sebagai modal usaha. Peningkatan penciptaan lapangan usaha selanjutnya juga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

Daftar Pustaka :

- Ahlburg 1996. Remittances and the Income Distribution in Tonga. *Journal Population Research and Policy Review* No.15 :391-400.
- Akita et al 1999. Inequality in the Distribution of Household Expenditure in Indonesia. *Journal Developing Economies* Vol.37 No.2 :197-221.
- Adam & Page 2005. Do International Migration and Remittances Reduce Poverty in Developing Countries ?. *Journal World Development* Vol.33 No.10 : 1645-1669.
- Adam 1996. Remittances, Income Distribution and Rural Asset Accumulation. *International Food Policy Research* No.17.
- Badan Pusat Statistik. [berbagai terbitan]. *Indikator Ketenagakerjaan*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. *Publikasi Sistem Neraca Sosial Ekonomi Nasional*, 2008 Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. *Publikasi Penghitungan dan Analisis Kemiskinan*, 2012 Jakarta.
- Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). *Laporan Perkembangan Penempatan Tenaga Kerja*. BNP2TKI, Jakarta.
- Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). *Rumusan Hasil Rapat Teknis BNP2TKI tahun 2013*. BNP2TKI, Jakarta.
- Borjas J. (2005). *Labor Economics*. Boston : Mc. Graw Hill,.
- Daryanto, A dan Y. Hafrianda. 2010. *Analisis Input Output dan Social*

- Accounting Matrix untuk Ekonomi pembangunan Daerah. IPB Press, Jakarta.
- Ebeke & Goff 2009. Why Migrant's Remittances Reduce Income Inequality in Some Countries and Not in Others ?. Document De Travail De La Serie Etudes et Documents No.9.
- Harahap 2012. *Estimating* Long-Run Elasticities of Rural Wage Rate Determinant In Indonesia : The Johansen Cointegration Methode. [Thesis] The University British of Columbia.
- Hayami I 2001. Development Economic from The Poverty to The Wealth of Nation 2nd ed. New York (US) : Oxford University Pers Inc.
- Osaki 2003. Migrant Remittances in Thailand : Economy Necessity or Social Norm ?. Journal Population Research and Policy Review Vol 20 No.2 :203-222.
- Todaro dan Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi. Edisi kesembilan. Jakarta : Erlangga.